



Jalan Menuju Keberlanjutan

– Rimbawan Indonesia berdialog dengan mitra Jerman
Catatan perjalanan tanggal 8 – 12 Maret 2010

gtz



Pada jalur yang tepat

Studi Kunjungan ke Jerman

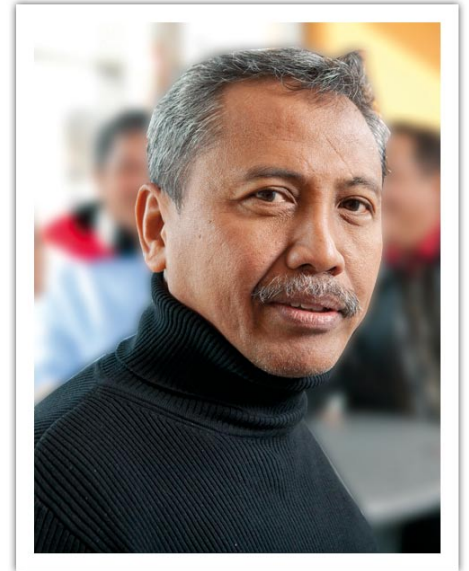
Indonesia ditetapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan secara drastis. Langkah paling penting yang diambil oleh Kementerian Kehutanan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui desentralisasi administrasi kehutanan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan, dan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Kementerian Kehutanan, Departemen Dalam Negeri dan Bappenas bekerjasama secara bahu membahu untuk mencapai sasaran tersebut. Pemerintah bermaksud untuk membangun kelembagaan baru dan kerangka kerja normatif hingga tingkat lokal untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Reorganisasi pengelolaan hutan di tingkat kabupaten sedang berjalan untuk memastikan pengelolaan lestari, pengawasan dan perlindungan atas sumberdaya hutan.

Indonesia telah mengadopsi mekanisme Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation – REDD) dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi. Dengan bantuan pendekatan REDD, PBB bertujuan untuk menciptakan pentingnya kerangka kerja bagi kinerja berbasis insentif guna perlindungan hutan dan pengelolaan hutan lestari. Indonesia secara aktif memperkenalkan konsep dan usulan dalam pertemuan internasional tentang iklim, dan saat ini sedang dalam proses pengembangan strategi dan regulasi untuk pelaksanaan REDD di dalam negeri.



Asosiasi perusahaan Jerman untuk kerja sama teknis (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH – GTZ) membantu Indonesia agar dapat mencapai sasarannya. Sebagai bagian dari program »Wald- und Klimawandel in Indonesien« (Hutan dan Perubahan Iklim di Indonesia), GTZ membantu mitranya melalui beberapa tingkat. Kerja sama yang dilakukan beragam mulai dari saran kebijakan untuk pembangunan kerangka kerja kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pembentukan perusahaan pengelolaan hutan lestari dan pelaksanaan konsep konservasi alam secara partisipatif. Selain itu, GTZ dan Kementerian Kehutanan sedang mengembangkan mekanisme REDD yang akan diujicobakan di beberapa lokasi percontohan di Kalimantan dan Sumatera. Hasil dari uji coba ini akan menjadi masukan bagi dialog internasional tentang REDD.



Hilman Nugroho

Dapat melihat secara langsung struktur yang telah terbukti bagus dan berdiskusi dengan para kolega merupakan cara yang menguntungkan untuk mempromosikan proses reformasi. Untuk itu, GTZ telah bertahun-tahun secara aktif mempromosikan dialog antara pakar Indonesia dari Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Departemen Dalam Negeri serta pejabat Hessen-Forst di Jerman. Hal ini merupakan latar belakang dari studi kunjungan pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia ke Jerman untuk melakukan dialog dengan mitra dari perusahaan Hessen-Forst dan Pemerintah Negara Federal Hessen. Melalui dialog intensif, muncul pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi sektor kehutanan di Indonesia.

Hasil dialog dari para pakar ini merupakan capaian penting tambahan dalam hubungan jangka panjang dan kerja sama yang sukses antara Jerman dan Indonesia dalam sektor kehutanan. Melalui brosur ini, kami ingin mendokumentasikan jalannya studi kunjungan. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik pihak Indonesia maupun pihak Jerman, atas partisipasi aktifnya.

Rolf Krezdorn, GTZ

Hilman Nugroho, Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan

GTZ
Sebagai suatu perusahaan kerja sama internasional bagi pembangunan berkelanjutan dengan wilayah operasional di seluruh dunia, GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) GmbH membantu pemerintah Jerman dalam mencapai tujuannya terkait dengan kebijakan pembangunan. GTZ membantu dalam penyelesaian yang berpandangan ke depan bagi pembangunan di bidang politik, ekonomi, ekologi dan sosial dalam era globalisasi saat ini dan mengembangkan reformasi dan proses-proses perubahan, yang seringkali berada dalam kondisi sulit, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi taraf hidup masyarakat berazaskan kelestarian.

Sejak 2000 hingga saat ini ...



Hutan yang dikelola secara lestari dapat melindungi keanekaragaman hayati dan sumber air, tanah dan iklim – selain juga memberikan bahan baku bagi industri kehutanan. Pemerintah Indonesia telah lama mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengelolaan hutan yang dilakukan dengan benar, efektif dan lestari.

Atas nama Pemerintah Jerman, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Asosiasi Pengusaha Jerman untuk Kerja Sama Teknis (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, GTZ) membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam tulisan ini, Jörg Albrecht dan Rolf Krezdorn menjelaskan tugas hariannya.

Sejak tahun 2000 hingga 2004 Jörg Albrecht, Kepala Konsultasi di Hessen-Forst, bekerja atas nama GTZ di Indonesia bersama perwakilan dari Kementerian Kehutanan. Sejak saat itu dia tetap menjaga hubungan dengan koleganya di Indonesia. Kepakarannya saat itu – dan hingga saat ini – diterima di Timur Jauh. Dia memiliki kenangan yang menyenangkan selama bekerja di Indonesia.

GTZ: Anda berangkat ke Indonesia tahun 2000. Pada saat periode awal, apa yang istimewa yang Anda kerjakan bersama dengan mitra-mitra di Indonesia?

Albrecht: Tahun 2000 merupakan tahun yang sangat mengasyikan bagi saya. Untuk pertama kali, pemerintah duduk bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perwakilan dari masyarakat madani untuk melakukan pertemuan rutin dan untuk mencapai tujuan bersama, dan hal yang paling penting didiskusikan adalah masalah perlindungan hutan di dalam enam kelompok kerja.

GTZ: Apa sebenarnya yang dicapai dari diskusi tentang perlindungan hutan di Indonesia?

Albrecht: Rekomendasi dari kelompok kerja telah dimasukkan ke dalam peraturan dan perundangan, serta aturan di bawahnya. Pada tahun 2001 Indonesia telah melakukan desentralisasi terhadap sektor-sektor utama, termasuk sektor kehutanan. Sebelumnya, semua keputusan datang dari Jakarta.

GTZ: ... dan ini berarti semuanya baik-baik saja?

Albrecht: Tidak, karena pejabat pemerintah daerah perlu waktu untuk berkembang dalam peran mereka sehingga mereka bisa mendapatkan keahlian yang mereka butuhkan. Proses ini masih terus berlangsung.

GTZ: Pada saat itu, apa yang menjadi tanggung jawab GTZ?

Albrecht: Pada dasarnya, kontribusi GTZ membantu untuk memastikan bahwa pegawai yang memiliki tanggung jawab di Kementerian Kehutanan ditingkatkan pengetahuannya akan prinsip-prinsip pengelolaan hutan dan pemanfaatannya, sesuai dengan kesepakatan dalam dialog internasional mengenai hutan, dan prinsip-prinsip ini direfleksikan ke dalam proses pengambilan keputusan di Kementerian Kehutanan. Orang-orang yang dulunya bekerjasama dengan GTZ sekarang ini telah menjadi pejabat tinggi di kementerian atau di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, dan mereka menginginkan semua berjalan. Saat ini, dalam beberapa hal masih ada kekurangan pengalaman praktek dan kemampuan manajemen di tingkat kabupaten, namun pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkannya.

Beberapa tahun telah dilalui sejak upaya awal dilakukan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan perlindungan iklim. Beberapa hal telah dicapai Indonesia, tetapi negara ini masih menghadapi beberapa perubahan. Rolf Krezdorn, Kepala Program GTZ tentang Hutan dan Perlindungan Iklim (GTZ Forest and Climate Protection Program) di Indonesia, telah membantu mitra kerjanya sejak awal 2009.



GTZ: Pak Albrecht telah berbagi pengalamannya sejak tahun 2000 dan setelahnya kepada kami. Anda sekarang bekerja bersama pemerintah Indonesia. Apa yang masih diharapkan oleh Indonesia?

Krezdorn: Negara ini sedang dalam proses mencapai reformasi sektor kehutanan. Sesuai dengan peraturan, industri kehutanan membutuhkan unit organisasi yang terdesentralisasi sehingga mudah dikelola dan dimonitor. Terutama dalam konteks iklim, Indonesia menargetkan untuk dapat mengontrol kebakaran hutan dan pembalakan liar. Pada tahun 2020, deforestasi dan degradasi hutan dapat dikurangi secara signifikan. Reformasi kehutanan di Indonesia merupakan prasyarat penting untuk mencapai hal tersebut, dan itu sebabnya mengapa GTZ memusatkan banyak bantuan untuk reformasi kehutanan.

GTZ: Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut?

Krezdorn: Desentralisasi bukan hanya memindahkan pegawai; tetapi juga berarti redistribusi tanggung jawab. Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten membutuhkan pakar lokal. Selain itu, pendanaan untuk mengelola hutan harus tersedia di semua tingkat pemerintahan. Pada tahun 2020 Indonesia berharap dapat menyiapkan kerangka kerja yang diperlukan sehingga pendanaan dapat mencapai ke pedesaan dan masyarakat lokal.

GTZ: Apa yang Anda lihat sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan?

Krezdorn: Satu hal yang pastinya diperlukan adalah adanya kesatuan pemangku hutan yang dikelola oleh personil yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia, dengan model yang hampir sama seperti yang ada di Jerman. Selain itu, sangat penting dilakukannya inventarisasi sumberdaya menyeluruh baik secara kualitas maupun kuantitas. Hanya dengan data seperti ini yang dapat mengidentifikasi wilayah mana yang harus dilindungi atau memiliki potensi komersial – dengan cara ini pemerintah baru dapat menyusun skenario pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan. Hal ini juga satu-satunya cara bahwa Kelompok Kerja Perubahan Iklim di Kementerian dapat mengembangkan suatu konsep untuk mengurangi emisi. Tentu saja, tata pemerintahan yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan merupakan aspek penting demi keberhasilan pengelolaan hutan dan perlindungan iklim.

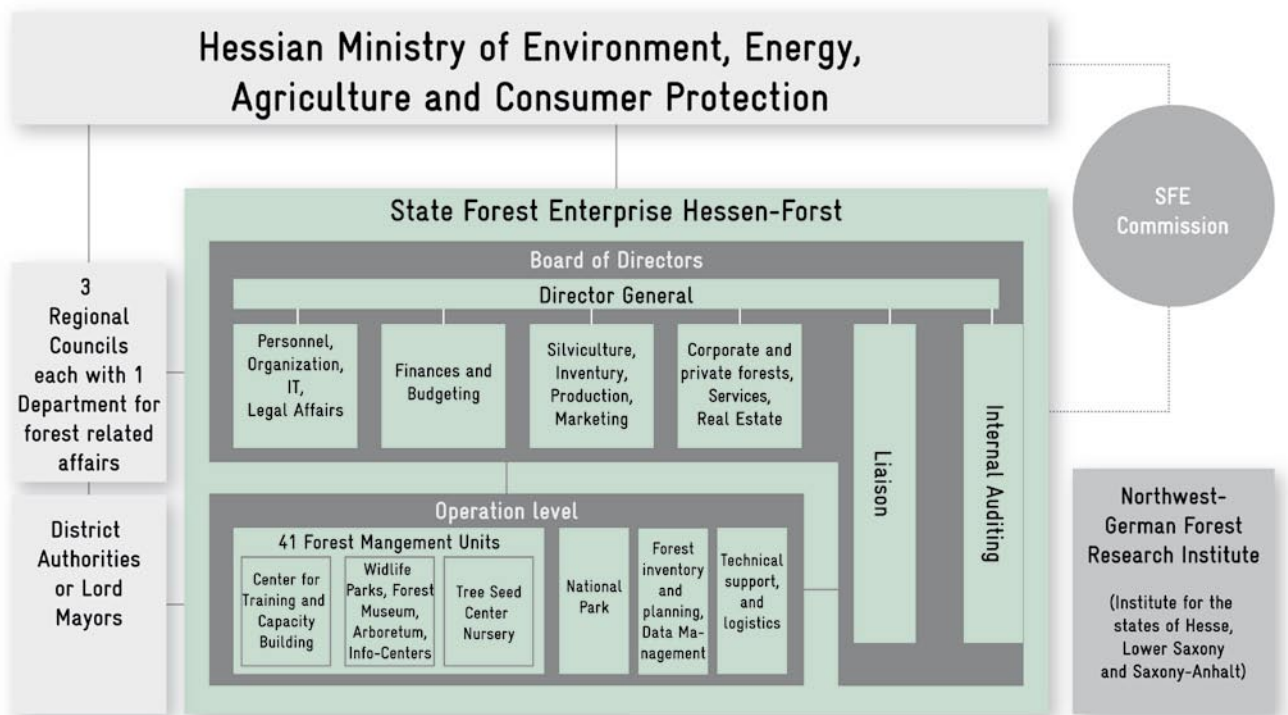


Mengunjungi Kantor Kehutanan Hanau-Wolfgang

Hanau-Wolfgang merupakan salah satu dari 41 kantor kehutanan di Hessen, salah satu negara Federasi Jerman. Manajer Kantor Kehutanan, Christian Schäfer, bertanggungjawab untuk mengelola kawasan hutan seluas 13.500 ha. Kawasan hutan tersebut utamanya merupakan hutan masyarakat, tetapi sebagai Manajer Kantor Kehutanan juga harus memelihara kawasan hutan negara dan pribadi yang memiliki lahan berkayu. Sembilan polisi hutan distrik bekerja dibawah tanggungjawabnya. Setiap tahun, Manajer Kantor Kehutanan duduk bersama dengan para polisi hutan untuk berdiskusi, yang tidak hanya membuat rencana tentang volume kayu dan lokasi pohon yang akan ditebang, tetapi juga membahas langkah-langkah investasi yang diperlukan untuk memasarkan kayu hasil teban



gan. Menurut Pak Schäfer, prinsip-prinsip untuk mengelola hutan adalah sangat gamblang: »Sebagaimana aturan umum, tidak diperbolehkan lagi tebang habis – kami hanya memanen kayu sebanyak yang akan tumbuh kembali, dan kami mengikuti kecenderungan permintaan kayu global untuk memastikan kami memperoleh harga sebagus mungkin.«



» Peran dan tanggung jawab dari suatu perusahaan kehutanan dan manajer kantor kehutanan

Perusahaan kehutanan bertanggungjawab atas:

- Pengelolaan hutan milik negara. Dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Peraturan perundangan
 - Prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan tujuan pengelolaan dari peruntukan hutan negara
 - Kepentingan komersial dan umum
 - Perencanaan sepuluh tahunan yang sedang berjalan
- Pengelolaan hutan masyarakat dan hutan milik. Aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan termasuk:
 - Peraturan perundangan
 - Tujuan dari pemilik
 - Perencanaan sepuluh tahunan yang sedang berjalan
- Pengelolaan kawasan konservasi alam
- Meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat secara umum
- Membantu pengelolaan hutan negara

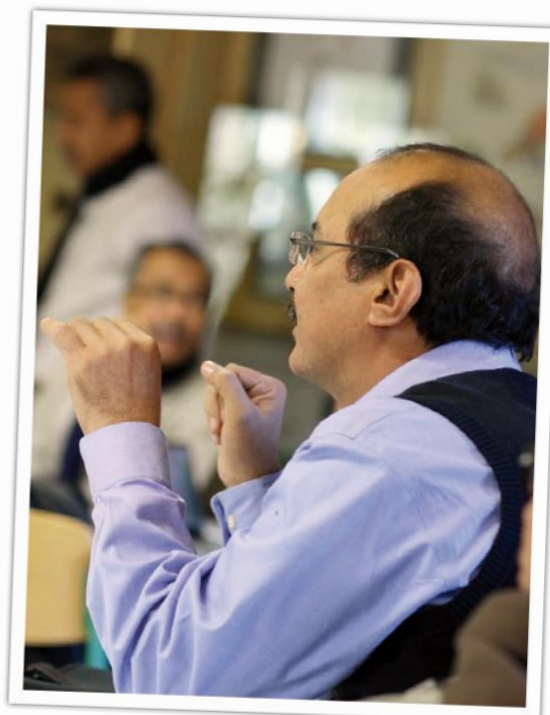
Apa tugas yang harus dilakukan oleh manajer kantor kehutanan?

- Melakukan pengelolaan terhadap karyawan
- Melakukan komunikasi internal dan eksternal
- Menyusun perencanaan sepuluh tahunan pengelolaan hutan distrik
- Memasarkan produk hasil hutan
- Menerapkan prinsip-prinsip silvikultur
- Melakukan pengawasan
- Mendelegasikan tugas-tugas

Para pelanggan membayar untuk semua jasa yang disediakan oleh anggota kantor kehutanan – tidak terkecuali apakah kayu berasal dari hutan masyarakat, lahan pribadi, hutan cadangan atau taman margasatwa. »Kami harus mendapatkan uang kami, sehingga kami mengenakan iuran tahunan sebesar 45 Euro per hektar bagi lahan berhutan,« jelas Schäfer. Namun demikian, pengelolaan hutan itu sendiri sama sekali tidak melingkupi seluruh kegiatan perusahaan hutan. Bagi Pak Schäfer, peran lain dari hutan juga penting: »Melalui



kami menawarkan kepada masyarakat sekitar suatu kawasan untuk rekreasi, dan kami memiliki museum hutan dan pusat informasi di Hanau sebagai tempat untuk pendidikan bagi publik terkait dengan pentingnya hutan sebagai ekosistem. Peran kami juga meluas pada perlindungan lingkungan dan konservasi alam, yang pada akhirnya juga berarti perlindungan iklim. Kesemuanya ini merupakan hal penting seperti juga pengelolaan hutan secara lestari.«





Kunjungan ke hutan masyarakat Schöneck

Hutan di Schöneck merupakan milik masyarakat lokal, dengan demikian, terserah masyarakat untuk menentukan bagaimana memanfaatkan dan mengelola hutan. Walikota Schöneck

menjelaskan hal tersebut secara lebih lengkap: »Di sini kami sependapat untuk memanfaatkan hutan sebagai kawasan rekreasi bagi masyarakat lokal. Rencana kami terkait dengan pengelolaan hutan selalu mempertimbangkan kebutuhan akan konservasi alam dan perlindungan lingkungan.« Hessen-Forst melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana sepuluh tahunannya dan juga rencana tahunan pengelolaan hutan. Perusahaan swasta juga turut serta mengurus pengelolaan hutan. Polisi hutan distrik, Heiner Koch, menjelaskan: »Pemerintah daerah membayar iuran tahunan



sebesar 45 Euro per hektar kepada Hessen-Forst. Sebagai balasannya, kami menawarkan layanan lengkap.« Hutan Schöneck memiliki beberapa tegakan tua pohon beech (*Fagus sp.*). Setiap tahun, Hessen-Forst memanen pohon beech pada lahan yang berbeda. Aturannya cukup jelas: »Kami hanya memanen sebanyak pohon yang akan tumbuh kembali. Kami juga hanya melakukan pemanenan pada bulan Oktober sampai Maret. Karena pada saat itu merupakan periode dormasi tumbuhan sehingga kerusakan yang ditimbulkan akibat pemanenan kayu akan sedikit, dan satwa liar di hutan tidak sedang memiliki anak,« kata Pak Koch menjelaskan tentang pekerjaannya.

Kegiatan pemanenan sedang berlangsung dalam petak tebang tahun ini. Pohon-pohon yang akan ditebang telah diberi tanda, termasuk arah rebahnya. Setiap 20 sampai 40 meter dapat dilihat dengan jelas di atas semak-semak – jalan sarad untuk batang kayu. Para penebang kayu mengangkut kayu di atas jalad sarad dengan menggunakan alat derek dan kemudian menumpuknya di sisi jalan, dikelompokkan sesuai dengan ukuran dan kualitas. Tidak memerlukan waktu lama untuk mengangkut dan menjual kayu-kayu tersebut. Pak Koch memantau keseluruhan proses mewakili pemerintah daerah, yang memperoleh pendapatan daerah tambahan dari penjualan kayu sebagai simpanan pemerintah daerah.

>> Pengusahaan hutan bagi Indonesia

Gerad Augustinus Silooy adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur. Dia terutama sangat tertarik pada model pengusahaan hutan yang telah berhasil dilaksanakan selama hampir 200 tahun di Jerman.

GTZ: Anda bekerja di dinas kehutanan kabupaten, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Bagaimana pengelolaan hutan dilaksanakan dilaksanakan saat ini di wilayah kerja Anda?

Silooy: Di negara kami, pengelolaan hutan sepenuhnya masih berdasarkan konsesi. Pemegang ijin konsesi bertanggungjawab penuh dan harus menyampaikan data rencana tahunan kepada dinas kehutanan yang harus diikuti oleh pemegang konsesi. Namun, hal ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena kami tidak mempunyai akses terhadap mekanisme pemantauan yang diperlukan.

GTZ: Menurut Anda, apa solusi yang lebih baik?

Silooy: Saya ingin melihat bagaimana kami dapat mentransfer organisasi pengusahaan hutan di Jerman dan peranannya untuk diterapkan di negara kami. Seperti di Jerman, kami memerlukan rencana pengelolaan hutan jangka pendek – dan jangka panjang, dan sistem pemantauan yang efektif untuk pelaksanaan rencana tersebut. Untuk itu, kami juga perlu melakukan inventarisasi hutan untuk memperoleh informasi terkini, sehingga kami dapat menggunakannya sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan. Di sini, di Jerman, saya mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana hal tersebut dapat bekerja secara nyata dan memutuskan aspek apa saja yang dapat ditransfer ke Indonesia.





Kawasan hutan dan lahan berkayu di Jerman – fungsi dan kepemilikan

40 persen dari kawasan hutan dan lahan berkayu di Jerman dimiliki oleh swasta, 35 persen milik masyarakat dan 25 persen sisanya dimiliki oleh individu. Di Jerman, hutan merupakan faktor ekonomi, sebagai penghasil kayu, tempat berburu dan memproduksi hasil hutan lainnya. Tetapi tidak hanya itu. Peran lain dari hutan dan lahan berkayu juga sama pentingnya, termasuk sebagai kawasan rekreasi, bagian dari skema pelatihan kehutanan, sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan sebagai sumber daya konservasi alam. Pengelolaan masing-masing lahan berkayu yang dimiliki secara pribadi harus secara hati-hati disesuaikan dengan kondisi dan fungsinya. Sementara sebagian fokus untuk memproduksi kayu, sebagian lainnya ditujukan bagi konservasi alam atau sebagai penyedia kawasan rekreasi bagi masyarakat lokal.

Kawasan hutan dan lahan berkayu di Jerman ditujukan bagi masyarakat. Tanpa memperhatikan apakah termasuk hutan negara, hutan milik masyarakat atau pribadi – pengunjung diperbolehkan masuk. Di dalam taman margasatwa, taman nasional dan taman alam yang dikelola oleh Hessen-Forst, para pengunjung dapat melihat flora dan fauna dari jarak dekat. Pada saat yang sama, taman-taman tersebut juga menghasilkan pemasukan berharga bagi perusahaan negara dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan lingkungan, dan juga merupakan bagian dari skema pelatihan kehutanan. Hutan-hutan di Jerman masing-masing memiliki peran berbeda yang pengelolaannya dilakukan dengan kehati-hatian dan dikoordinasikan dengan baik.



» Hal-hal yang perlu dikuasai oleh seorang rimbawan ...

Struktur kehutanan yang baru akan dapat bekerja apabila personel yang terlibat juga memiliki tingkat keahlian yang dibutuhkan. Helmi Basalamah memiliki tanggung jawab di Kementerian Kehutanan Indonesia untuk pelatihan awal dan lanjutan bagi karyawan di bagian administrasi dan ke depannya bagi perusahaan kehutanan. Dia sangat ingin mengetahui sebanyak mungkin mengenai isi program pelatihan.

GTZ: Anda bertanggungjawab atas pelatihan karyawan administrasi kehutanan dan perusahaan kehutanan. Apa aspek dari kunjungan Anda ke Hessen-Forst yang penting bagi pekerjaan Anda?

Basalamah: Bagi saya, sangat menarik saat mendengar bahwa sangat beragamnya tugas-tugas yang diharapkan harus dikelola oleh karyawan Hessen-Forst, dan apa artinya ini terkait dengan keahlian dan pengetahuan. Selain itu, saya juga sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana polisi hutan disiapkan untuk menjalankan tugasnya disini di Jerman.

GTZ: Apa hasil yang akan Anda bawa pulang dari Jerman, baik untuk Anda sendiri dan juga pekerjaan Anda?

Basalamah: Pertama-tama, keyakinan saya semakin kuat bahwa hanya dengan pelatihan teori tidak akan mencukupi. Manusia perlu memiliki pengalaman praktek. Kami telah menyusun suatu kursus pelatihan sarjana bagi karyawan dengan bantuan tenaga ahli Jerman dari CIM, yang menggabungkan teori dengan praktek. Selain itu, kami juga mengelola delapan pusat pelatihan daerah. Namun, saya pikir kami masih perlu menyesuaikan kurikulum kursus. Pertukaran yang intensif dengan pelatihan petugas di Hessen-Forst merupakan hal yang luar biasa bagi saya – dan saya berharap bisa diperluas lebih jauh di masa depan.





>> Kualifikasi dan tanggung jawab pegawai kantor kehutanan

Manajer bagian kehutanan:

- Sarjana, lulusan universitas, memiliki dua tahun pengalaman praktek pengelolaan hutan dan inspeksi.
- Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai wilayah kerja Hessen-Forst.
- Pengelolaan hutan secara teknis dan komersial.
- Pemasaran dan pengelolaan kualitas.
- Pengelolaan keuangan dan properti.
- Berperan besar dalam menetapkan sasaran operasional dalam rencana tahunan.
- Menawarkan layanan jasa bagi pemilik hutan, masyarakat umum dan manajer senior.
- Mempekerjakan karyawan dan magang kerja.
- Memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan terkait.

Polisi hutan disktrik:

- Sekolah tinggi kehutanan
- Memiliki pengetahuan lapangan terkait dengan teknis, komersial dan ekologis dalam pengelolaan hutan, berburu, konservasi alam dan perlindungan lingkungan.
- Pengelolaan hutan secara teknis atas berbagai tipe hutan.
- Menggabungkan aspek-aspek perlindungan bentang alam dan konservasi alam dalam pekerjaannya.
- Bekerjasama dengan masyarakat dan pemilik hutan, membantu dalam menyiapkan perencanaan tahunan hutan masyarakat dan hutan milik sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- Berbagi tanggung jawab dalam pelatihan kehutanan, pendidikan kesadaran tentang hutan berbasis lingkungan dan fungsi hutan sebagai sarana rekreasi.
- Terlibat dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Sejarah kehutanan Jerman

Selama abad pertengahan, masyarakat Jerman dan Eropa menghancurkan wilayah yang memiliki hutan sehingga hanya menyisakan beberapa pohon saja. Meskipun demikian, pada akhir abad ke 18, perilaku masyarakat terhadap hutan berubah. Usaha pembaharuan dilakukan dengan melindungi dan menghutankan kembali kawasan yang sudah rusak. Pada saat itu, rimbawan Jerman Georg Ludwig Hartig menjelaskan konsep kelestarian, yang masih tetap diacu hingga sekarang: »Pengelolaan hutan jangka panjang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dicapai tanpa perhitungan secara teliti jumlah kayu yang diambil dari hutan untuk memastikan bahwa pemanenan kayu yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dengan demikian, setiap instansi kehutanan yang bijaksana harus segera melakukan inventarisasi dan penilaian hutan; hal tersebut harus dilakukan seteliti mungkin dan digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa generasi berikutnya dapat menikmati manfaat hutan setidaknya sama seperti manfaat yang dirasakan oleh generasi saat ini.«.



Pada saat periode yang sama, pihak kerajaan di Jerman pertama kali memperkenalkan sistem polisi hutan distrik. Para polisi hutan ini bertanggungjawab atas sisi praktis pengelolaan hutan, yang dibagi menjadi bagian-bagian untuk memudahkan pengelolaan. Sebaliknya, kepala kantor kehutanan menangani hal-hal yang terkait dengan perdagangan dan administrasi. Struktur seperti ini terbukti berhasil dan berlangsung selama 200 tahun serta masih tetap dipakai hingga saat ini. Hutan-hutan di Jerman, yang pernah mengalami kemunduran dan kehancuran, telah mengalami regenerasi dalam kurun waktu dua abad terakhir berkat diterapkannya cara-cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Saat ini, manfaat komersial dan sosial dari hutan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jerman.



>> Perusahaan negara Hessen-Forst

- Perusahaan negara merupakan 100% kepemilikannya dimiliki oleh Negara federal Hessen.
- Hessen-Forst termasuk 41 asosiasi perusahaan kehutanan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Hessen. Wilayah yang tercakup tidak hanya hutan, tetapi juga termasuk kota-kota, desa-desa dan jalanan.
- Setiap perusahaan kehutanan mempekerjakan sepuluh polisi hutan distrik, yang bertanggungjawab atas pengelolaan secara teknis atas lahan sekitar 2000 ha.
- Pimpinan perusahaan kehutanan bertanggungjawab atas pemasaran, pengelolaan, manajemen kualitas dan proses, personil dan prosedur organisasi.

>> Peran Hessen-Forst

- Pengelolaan dan budidaya yang berkelanjutan dari badan usaha milik negara sesuai dengan faktor komersial, memperhitungkan keuntungan dan kepentingan publik.
- Konsultasi, membantu dan mengelola hutan masyarakat dan lahan pribadi berdasarkan hukum dan persyaratan kontrak.
- Inventarisasi hutan, perencanaan sepuluh tahunan dan rencana tahunan pemanfaatan hutan bagi hutan milik negara dan milik masyarakat.
- Penelitian dan kajian di lapangan mengenai ekologi, pertumbuhan hutan, kondisi daerah, perlindungan sumber genetik, pemantauan kesehatan, perlindungan bentang alam dan perlindungan lingkungan.
- Pengelolaan hak milik Hessen-Forst.
- Pelatihan awal dan lanjutan bagi semua personil, pelatihan lingkungan, humas dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang sumber daya alam dan mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan alam.



Hutan sebagai persoalan politik

Secara tradisional, masyarakat di berbagai negara selalu menggunakan tanah penuh hara untuk keperluan pertaniannya, sementara tanah yang miskin hara di pedesaan tetap dibiarkan. Saat ini, lahan miskin hara tersebut telah tertutupi hutan di Jerman, dan meliputi 30 persen dari luasan kawasan. Pemerintah Jerman bertujuan untuk menjaga persentasi ini dan bahkan berencana untuk sedikit meningkatkannya. Salah satu alasannya adalah kenyataan bahwa peluang kerja cenderung sedikit di wilayah perkotaan, sementara hutan dapat memberikan banyak peluang bagi tenaga kerja. Menurut data statistik, pemanenan satu kubik kayu dapat menciptakan

» Kementerian Lingkungan, Energi, Pertanian dan Perlindungan Konsumen Hessen, Wiesbaden

Kerangka kerja hukum:

- Pengelolaan hutan jangka panjang dan berkelanjutan.
- Berbagai pemanfaatan hutan dalam areal yang sama (untuk produksi kayu, perlindungan lingkungan, sebagai lokasi rekreasi bagi masyarakat lokal).
- Dilarang tebang habis.
- Pemilihan jenis pohon disesuaikan dengan kondisi spesifik kawasan hutan.
- Penggunaan pestisida sebagian besar dihindari.
- Penerapan rencana sepuluh tahunan untuk pengelolaan hutan.
- Luasan hutan yang ada harus dijaga atau diperluas.
- Fungsi hutan harus diperkuat dan dijaga.
- Biaya untuk pengelolaan hutan harus efektif.
- Semua persyaratan harus dipatuhi oleh semua pemilik hutan.

duabelas peluang kerja, termasuk misalnya kegiatan penebangan pohon, pengangkutan kayu, industri kayu gergajian dan proses lanjutannya. Terkait dengan politik di Jerman, hutan memegang peranan yang sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan.

Peranan Kementerian sehubungan dengan Hessen-Forst:

- Menyetujui peraturan perusahaan Hessen-Forst.
- Menunjuk kepala Hessen-Forst.
- Memeriksa rencana tahunan dan neraca tahunan.
- Menunjuk auditor bagi Hessen-Forst.
- Membuat keputusan politis.
- Tidak terlibat dalam pelaksanaan operasional kerja dari Hessen-Forst.

Apa yang diharapkan oleh Kementerian dari Hessen-Forst:

- Hasil produksi kayu dari hutan milik negara, hasil keuangan yang bagus dan kondisi ekologi yang bagus.
- Perlindungan dan rehabilitasi hutan milik negara.
- Hutan milik negara dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi lokal dan tempat pendidikan kesadaran lingkungan.
- Layanan jasa bagi pihak ketiga, khususnya bagi masyarakat dan pemilik hutan hak.
- Tugas resmi: mengimplementasikan kontrak hukum, melaksanakan rencana tahunan, memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada pihak ketiga.

Kementerian memeriksa rencana tahunan dan menyiapkan anggaran untuk kegiatan berikut yang dilakukan oleh Hessen-Forst, yaitu:

- Mengelola hutan milik negara.
- Mengelola taman nasional.
- Mengelola hutan masyarakat.
- Mengelola kontrak bagi hutan milik.
- Melakukan pendidikan kesadaran lingkungan.
- Melakukan penelitian.

Selain itu, permintaan masyarakat atas hutan sebagai tempat rekreasi dan sebagai kawasan konservasi alam sangat tinggi. Ini merupakan hal lain yang perlu dipertimbangkan juga dalam penyusunan kebijakan kehutanan. Sebagai konsekuensinya, negara federal Hessen telah menetapkan kepemilikan sebesar 40 persen dari seluruh areal hutan yang ada. Dibutuhkan keikutsertaan

peran penting masyarakat dalam mengelola hutan milik negara ini. Namun bagaimanapun juga, pemilik hutan masyarakat dan pribadi juga harus mempertimbangkan kebutuhan publik. Kantor kementerian telah memberikan wewenang yang luas dan keleluasaan pengambilan keputusan bagi

para pengusaha hutan. Mereka merupakan orang local dan mengetahui apa yang terbaik dalam mengelola berbagai tipe hutan – mempertimbangkan kepentingan publik dan pertimbangan perdagangan serta sejalan dengan keinginan pemilik hutan masyarakat dan hutan pribadi.

>> Kondisi yang menjanjikan ...

Carsten Wilke, Asisten Sekretaris dan Kepala Administrasi Kehutanan Negara Federasi Jerman, melakukan kunjungan ke Indonesia selama beberapa minggu sebagai konsultan bagi koleganya di Kementerian Kehutanan di Jakarta. Dalam wawancara, dia menjelaskan bagaimana dia melihat hubungan antara hutan dan iklim dan bagaimana pendapatnya tentang reformasi yang dialami koleganya di Asia.



GTZ: Masyarakat internasional menuntut negara-negara yang masih memiliki hutan yang luas untuk melakukan segala cara untuk melindungi hutannya. Perlindungan iklim merupakan faktor utama disini. Bagaimana Anda melihat hubungan iklim dan hutan?

Wilke: Di Jerman, pemerintah pusat dan pemerintah negara federasi memandang hutan sebagai penyerap CO₂. Hutan kita merupakan bagian dari iklim dan perhitungan emisi. Oleh sebab itu, kami selalu menjaga hutan kami dalam kondisi dimana hutan dapat menyerap lebih banyak CO₂ dari pada yang dikeluarkannya, artinya dalam kondisi dimana hutan dapat mengurangi tingkat CO₂ di atmosfer. Pendekatan ini yang seharusnya digunakan di seluruh dunia, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang masih memiliki lahan yang sangat luas termasuk hutan.

GTZ: Indonesia sedang melakukan langkah-langkah untuk menangani deforestasi. Langkah awal telah dilakukan di negara tersebut. Bagaimana Anda menilai hal ini?

Wilke: Pertanyaan umum yang terkait dengan terjadinya proses reformasi ini adalah seberapa besar keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Saya rasa kondisi yang sedang terjadi di Indonesia sangat menjanjikan. Pemerintahnya sangat peduli terhadap tingkat kerusakan hutan yang terjadi dan yakin bahwa perlu untuk melakukan perubahan. Kementerian Kehutanan akan mengelola dan mengolah hutan dengan cara-cara yang berkelanjutan – setiap orang memiliki tujuan yang sama. Hal ini merupakan langkah awal yang bagus.

GTZ: Salah satu topik penting dari proyek ini adalah desentralisasi sektor kehutanan. Bagaimana Anda melihat upaya-upaya ini?

Wilke: Struktur negara sebagai suatu negara kepulauan sangat menuntut persoalan desentralisasi dan penyelesaian tuntutan regional. Meskipun negara ini sangat beragam, dengan berbagai suku dan pendekatan, tetapi tetap stabil dan berjalan dengan baik. Kondisi ini yang menyebabkan saya sangat yakin bahwa Indonesia akan dapat mengatasi persoalan desentralisasi dan pembagian kewenangan dengan baik.

>> Negara kami sedang dibawah tekanan hebat

Basah Hernowo mengawal reformasi kehutanan melalui tempatnya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Menurutnya, struktur pengelolaan hutan dan administrasi kehutanan Jerman merupakan suatu model pengelolaan hutan yang bagus. Pak Hernowo yakin sekali bahwa Indonesia memerlukan aksi jangka pendek untuk mengatasi deforestasi dan juga untuk mencari cara agar dapat memanfaatkan hutan secara lebih lestari.



GTZ: Indonesia sedang dalam proses reorganisasi dan desentralisasi terkait dengan administrasi kehutanan dan struktur manajemen. Apa yang memotivasi proses tersebut?

Hernowo: Negara kami menghadapi tekanan yang cukup serius terkait dengan pembabatan liar. Setiap hari kami kehilangan luasan hutan dan kualitas hutan serta keanekaragaman hayati mengalami tekanan. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap kondisi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Kami ingin menjaga hutan kami sebagai bagian dari program Perserikatan Bangsa-bangsa terkait dengan pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (UN REDD) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan. Untuk melakukan hal ini, kami memerlukan administrasi dan struktur manajemen yang berbeda.

GTZ: Pemerintah Anda tertarik terutama pada sistem administrasi kehutanan yang diterapkan di Hessen, Jerman. Mengapa sistem tersebut begitu penting bagi Anda?

Hernowo: Di Indonesia, kami menghadapi situasi yang kadang tanggung jawab untuk mengelola 500.00 hektar hutan harus dipikul oleh hanya 20 orang. Pemerintah daerah seharusnya yang mengelola hutan produksi, tetapi struktur yang dibutuhkan dan sumberdaya manusianya juga masih kekurangan. Kami dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari hanya apabila terdapat struktur kerja pengelolaan hutan di daerah. Sistem pengelolaan hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Jerman dengan kantor-kantor kehutanan dan polisi hutan distrik serta peta kawasan hutan yang jelas nampaknya akan menjadi solusi terbaik bagi pengelolaan hutan kami.

GTZ: Apakah masih dalam tahap konsep, atau apakah Anda sudah memiliki rencana yang nyata untuk menerapkan struktur kehutanan di Indonesia?

Hernowo: Kami berencana untuk memperkenalkan perusahaan kehutanan di sebagian provinsi di Indonesia pada tahun anggaran berikutnya. Kami perlu berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah, langkah-langkah peraturan tentunya akan diperlukan terkait dengan hal ini. Beberapa persoalan untuk menangani permasalahan terkait dengan reformasi keuangan, berbagi tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah dan perusahaan kehutanan, selain itu juga berbagai pelatihan yang nantinya akan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Kami sedang melakukan hal ini – kami akan membawa banyak pemikiran setelah kembali dari studi banding ini.

GTZ: Sepertinya sudah punya rencana nyata yang kelihatan sangat penting bagi Anda ...

Hernowo: Ya tentu! Masih ada beberapa wilayah yang saat ini belum dikelola secara lestari karena tidak tersedianya struktur manajemen, kurangnya sumberdaya manusia dan keahlian. Hal ini akan segera berubah. Kami perlu adanya struktur manajemen lokal: bila saatnya kami telah bisa mengatasi hal ini, kita bisa bicara berbagai hal terkait dengan perubahan iklim, tetapi tidak akan ada yang berubah. Oleh karena itulah mengapa kami saat ini memperkenalkan struktur pengelolaan hutan berdasarkan model yang dikembangkan oleh Jerman.



Direncanakan dengan baik

Bunyi terompet berburu yang ditiup oleh Eckhard Richter, seorang polisi hutan distrik, menyambut rombongan tamu dari Indonesia yang berkunjung ke hutan masyarakat Lich. Sang polisi hutan sangat memahami kondisi hutannya, termasuk keadaan tanah, umur pohon dan keadaan iklimnya. Semua informasi tersimpan dalam



peta-peta pengelolaan hutan yang dia gunakan untuk membantu pekerjaannya sehari-hari: »Dengan peta-peta ini, saya memiliki gambaran yang jelas tentang dimana suatu jenis pohon dapat ditemukan, dan berapa tahun umurnya.« Masyarakat Kota Lich mengharapkan Richter untuk dapat mengelola hutan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Namun demikian, keputusan terkait dengan kapan waktu memanen kayu dan di lokasi yang mana, sepenuhnya ditangan Richter dan ditetapkan berdasarkan fakta dan angka. »Kami memiliki pohon yang bervariasi

umur dan besar diameternya. Kami tidak hanya memberi tanda pada pohon yang akan ditebang, tetapi juga tanda arah rebah dan jalan sarad untuk mengeluarkan kayu. Kami juga memastikan untuk meminimalisasi kerusakan akibat penebangan terhadap tegakan sisa, dan juga menandai pohon yang dilindungi untuk tujuan konservasi alam,« jelas Richter. Para polisi hutan distrik hanya melakukan penanaman kembali tanaman hutan pada daerah yang terisolasi. Umumnya, proses regenerasi tanaman hutan dibiarkan terjadi secara alami. Dengan pengelolaan hutan yang terencana dengan baik, maka proses regenerasi secara alami dapat berjalan dengan sangat baik pula dan dari segi biaya merupakan pendekatan yang lebih efektif.

O Tanpa berbasis pada informasi perencanaan yang disediakan oleh FENA, para polisi hutan akan tidak dapat berbuat apa-apa. »Para pemilik mengharapkan adanya keuntungan dari pengelolaan hutan sepanjang tahun. Pada saat yang sama, keputusan ada pada saya untuk memastikan bahwa hutan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Tanpa adanya informasi yang rinci mengenai tegakan hutan, saya tidak mungkin dapat menjalankan tugas saya seefektif yang saya kerjakan selama ini,« ujar Richter untuk menyakinkan. Dengan adanya rencana 10 tahunan, polisi hutan dapat mengetahui berapa jumlah tegakan hutan yang dapat dimanfaatkan, dimana dia harus menjaga kawasan yang perlu dilindungi karena merupakan rumah bagi tanaman langka dan satwa liar, dan dimana anakan pohon dapat tumbuh. Dengan terlaksananya semua rencana, tidak ada yang menjadi penghalang dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Inventarisasi – dasar suatu perencanaan

Rencana sepuluh tahunan merupakan persyaratan yang ditetapkan melalui undang-undang, sama halnya dengan rencana pengelolaan hutan tahunan. Namun, rencana tersebut baru bermanfaat apabila pegawai yang diberi tugas di

Hessen-Forst dan di kantor Kementerian memiliki akses terhadap fakta nyata dan angka-angka mengenai hutannya. Merupakan tugas dari FENA (Agency for Forest Management Planning and Nature Conservation – lembaga perencanaan pengelolaan hutan dan konservasi alam) untuk mengumpulkan, memproses dan membuat data mengenai hutan yang ada. Setiap sepuluh tahun, pegawai FENA mengunjungi kantor kehutanan dan mengumpulkan data mengenai hutan. Dalam proses tersebut, mereka memperhatikan berbagai aspek terkait dengan hutan dengan melakukan inventarisasi:

Inventarisasi:

Inventarisasi tegakan:

⇒ Jenis pohon, tinggi pohon, lingkar batang, umur pohon, persentase dan jenis pohon campuran, kelas panen, tingkat inventarisasi, kualitas kayu, kondisi. Dari hasil data analisis dapat diketahui volume kayu.

Fungsi hutan:

⇒ Fungsi perlindungan (air, erosi, iklim, konservasi alam) dan fungsi rekreasi bagi masyarakat lokal.

Faktor lokasi:

⇒ Pertumbuhan, faktor iklim, ketinggian, zona pertumbuhan, sifat tanah, ketersediaan nutrisi, kelembaban tanah

>> FENA, Giessen

Bahan-bahan peta

FENA menyiapkan peta khusus untuk pengelolaan hutan berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil inventarisasi hutan. Peta tersebut menggambarkan lokasi dan semua data dalam suatu sistem informasi geografis, yang biasanya digunakan untuk menghasilkan:

- Peta-peta yang menunjukkan kawasan hutan dan perbatasannya.

- Peta-peta yang memperlihatkan kawasan hutan dengan berbagai ukuran mulai dari 10 hingga 15 hektar.
- Peta-peta untuk melakukan pengelolaan dari masing-masing kompartemen dilengkapi dengan informasi tentang jalan, jenis pohon, umur pohon.
- Peta-peta pengelolaan hutan yang menunjukkan peta dari pengelolaan masing-masing kompartemen yang memiliki ukuran kecil.
- Peta-peta yang menunjukkan kondisi masing-masing lokasi.
- Peta-peta yang menunjukkan sasaran operasional kerja.
- Peta-peta tematik, seperti peta kondisi darurat yang menunjukkan akses rute bagi unit pemadam kebakaran, ambulans dan polisi jika terjadi kondisi darurat.

Perencanaan pengelolaan hutan

Perencanaan sepuluh tahunan

- Sebelum dilakukannya inventarisasi hutan, pemilik hutan, manajer kantor kehutanan, karyawan FENA, petugas unit kehutanan dari komisi regional dan anggota penanggungjawab dari kementerian bagi lingkungan, energi, pertanian dan perlindungan konsumen – Hessian Ministry for Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection (HMU-ELV) – melakukan pertemuan bersama.
- Mereka mendiskusikan sasaran yang ingin dicapai oleh pemilik hutan dan negara federal Hessen, iuran pengumpulan, fungsi hutan dan peremajaan pohon untuk sepuluh tahun kedepan.
- Setelah hasil inventarisasi hutan diperoleh, semua pihak terkait memeriksa apakah target dapat dicapai, mendiskusikannya dan menyesuaikan dengan kondisi hutan saat ini.
- Hasil diskusi ditandatangani oleh semua peserta.
- Dokumen tersebut sah secara legal dan mengikat.

Perencanaan tahunan

- Manajer kantor kehutanan, polisi hutan distrik dan pemilik hutan bertemu dan menyusun rencana pengelolaan dan budidaya hutan untuk tahun selanjutnya.
- Persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan sepuluh tahunan adalah mengikat dan menyediakan rangka kerja bagi penyusunan rencana tahunan.



Dampak perubahan iklim terhadap hutan

Kegiatan inventarisasi hutan yang dilakukan oleh FENA selama beberapa dekade terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan iklim juga telah meninggalkan tanda pada hutan di Jerman. Pohon cemara Picea sp, pohon asli yang tumbuh di Jerman, sedang berjuang untuk mengatasi kondisi lingkungan. Musim panas yang lebih hangat dan lebih rendahnya tingkat curah hujan sepanjang tahun telah menyebab-



kan menurunnya proporsi pohon cemara Picea Sp di Hessen sekitar 30% sampai 25%. Pohon cemara Picea sp membutuhkan banyak air dan kelembaban tinggi. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi lagi, maka pohon cemara akan cepat melapuk, sehingga menjadi lebih rentan terhadap hama kutu dan pada akhirnya akan mati.

Dalam rangka menggantikan tegakan cemara Picea sp, Hessen-Forst telah memperkenalkan jenis konifer lainnya, yaitu cemara Douglas dari Amerika Serikat. Saat ini tiga persen dari hutan Hessen ditumbuhi dengan species yang didatangkan dari Amerika ini. »Kami memperkenalkan cemara Douglas untuk kepentingan komersial bagi Jerman. Namun, kami bertujuan untuk tetap menjaga proporsi species asing lebih rendah dari species asli sehingga flora dan fauna asli tidak terancam,« jelas Dr. Jürgen Willig, Kepala Bagian Inventarisasi dan Perencanaan di FENA. Apakah ini artinya bahwa pohon cemara Picea sp tidak dibudidayakan lagi di Jerman? »Akan ada beberapa tempat dimana masih memungkinkan pohon cemara Picea sp untuk bertahan hidup – area dengan tingkat curah hujan yang lebih tinggi sehingga kondisi lingkungan akan menguntungkan bagi Picea sp untuk tetap hidup,« hibur Willig. Pada lokasi yang kurang mendukung bagi pohon cemara Picea sp untuk hidup, maka lokasi tersebut akan ditanami dengan cemara Douglas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Contoh tadi menjelaskan bahwa hutan dan pengelolaan hutan beradaptasi terhadap perubahan iklim.



>> Kami ingin menjaga hutan demi masyarakat

Muhammad Ali Arsyad dan Sriyono keduanya bekerja pada Kementerian Kehutanan Indonesia, yang bertanggungjawab atas perencanaan kehutanan. Saat ini keduanya bekerja secara intensif terkait dengan reformasi sektor kehutanan dan memiliki pemikiran nyata tentang pendekatan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah sehubungan dengan pembangunan bidang kehutanan.

GTZ: Anda berdua bekerja pada Kementerian Kehutanan, yang bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan kehutanan di Indonesia. Apa penilaian Anda mengenai kondisi saat ini terkait dengan kerangka kerja pengelolaan hutan di Indonesia?

Arsyad: Pada tahun 1999, kami melakukan reformasi dengan melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah di kabupaten. Namun sayangnya struktur baru tersebut kurang berhasil. Kawasan hutan kami secara terus menerus berkurang.

GTZ: Apa yang menurut Anda menjadi penyebabnya?

Arsyad: Meskipun kami memiliki administrasi kehutanan di tingkat pusat dan di tingkat provinsi, kami tidak memiliki struktur administrasi di tingkat wilayah kerja, misalnya di lapangan. Hal ini menjadi penyebab mengapa kami tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang model pengusahaan hutan di Jerman, yang telah memiliki struktur administrasi kehutanan yang dapat bekerja di tingkat lokal.

GTZ: Dapatkah Anda membayangkan sistem yang ada di Jerman diterapkan di Indonesia?

Sriyono: Tentu saja kami harus mengembangkan model pengusahaan hutan yang disesuaikan dengan kondisi hutan di Indonesia. Hal ini sedang dikembangkan. Kami telah mempersiapkan perusahaan-perusahaan hutan di 23 wilayah percobaan. Selain itu, skala operasional di Indonesia cukup berbeda dibandingkan dengan yang ada di Jerman – kami memiliki 136 juta hektar hutan dimana kami bertujuan untuk mengelolanya secara lestari. Tentu saja kawasan hutan yang sangat luas ini harus dibagi menjadi unit-unit pengelolaan untuk dapat lebih memudahkan dalam mengelolanya. Di Indonesia, hal ini berhubungan dengan ukuran suatu wilayah distrik.

GTZ: Jadi menurut Anda proses restrukturisasi sedang berlangsung. Bisa dijelaskan apa artinya?

Sriyono: Kami di Kementerian Kehutanan telah menyusun suatu konsep, yang saat ini sudah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Segera setelah ditandatangani, pemerintahan tingkat provinsi harus mengadopsi dan menerapkan peraturan perundangan yang baru di tingkat kabupaten. Kami berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa pelaksanaan sistem yang diterapkan di Hessen-Forst.

GTZ: Kemana arah yang Anda harapkan pembangunan kehutanan di Indonesia dalam lima tahun kedepan?

Arsyad: Bayangan saya adalah kami memiliki perusahaan-perusahaan kehutanan yang beroperasi – dikelola oleh orang-orang yang mau bekerja menjalankan tugas-tugasnya dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola hutan di wilayah kerjanya. Mereka harus berada di posisi untuk melindungi hutan demi masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan mengatasi kegiatan pembalakan liar.



Muhammad Ali Arsyad



Sriyono



Bersatu mereka kuat

Kantor kehutanan Michelstadt merupakan kantor yang sedikit lebih spesial di Hessen: sebagian dari hutannya yang tersebar di sembilan wilayah distrik merupakan hutan milik, dan sisanya adalah hutan milik masyarakat. Hanya 14 persen dari hutan yang ada dimiliki oleh negara. Meskipun demikian, polisi hutan, dipkerjakan oleh Hessen-Forst yang mengelola semua hutan yang ada, bekerja tanpa melihat status kepemilikan hutan. Sekilas dari peta pengelolaan hutan distrik terlihat bahwa sebagian besar hutan tanaman memiliki luasan

yang kecil – beberapa bahkan hanya seluas satu hektar. Pengelolaan dan pembudidayaan lahan sekecil itu menjadi tidak mungkin, maka pemilik hutan pribadi dan hutan masyarakat berjuang bersama dan membentuk koperasi untuk mengelola hutan.

3.000 pemilik hutan pribadi dan sebelas kelompok masyarakat merupakan anggota dari koperasi pengelolaan hutan Odenwald. Mereka membahas berbagai kepentingan dalam koperasi dan bertindak sebagai suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama yang telah menandatangani kontrak dengan Hessen-Forst untuk pengelolaan seluruh kawasan hutan. Ketua mewakili koperasi hutan dalam melakukan kesepakatan dengan Hessen-Forst dan melakukan negosiasi terkait dengan pengelolaan dan budidaya hutan. Kantor kehutanan dan



koperasi bekerja bersama-sama dan memiliki hubungan yang sangat erat. Hessen-Forst melakukan pengelolaan hutan dan menangani pemasaran kayunya. Koperasi membayar Hessen-Forst untuk layanannya: 60 persen per meter kubik kayu bulat yang terjual diberikan pada Hessen-Forst sebagai pembayaran layanannya. Sebagai gantinya, pemilik hutan memperoleh jasa pengelolaan hutan menyeluruh dan mendapatkan harga yang bagus atas kayu yang dijual. Hal ini dapat terjadi karena Hessen-Forst

sepanjang waktu secara teliti mengikuti situasi pasar kayu sehingga sangat mengerti jenis kayu yang paling banyak permintaannya di pasar. Sehingga Hessen-Forst dapat memasok kepada pengguna sesuai dengan jumlah yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha hutan dengan skala kecil. Dengan cara ini, pemilik hutan memperoleh keuntungan karena hutan dikelola secara profesional dan pengelolaan hutan berkelanjutan juga terjamin.

>> Hutan milik banyak orang

Marthen Kayoi adalah Kepala Dinas Kehutanan di Provinsi Papua. Di dalam wilayah kerjanya, dia harus menghadapi berbagai pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan hutan. Bagi Kayoi, solusi yang optimal adalah mengajak semua kelompok yang berbeda ini menjadi pengguna yang dapat bekerjasama.

GTZ: Apa aspek kunjungan Anda ke Hessen-Forst yang paling penting bagi pekerjaan Anda?

Kayoi: Saya sangat terkesan dengan cara kerja koperasi pengelolaan hutan – seperti yang saya lihat di Michelstadt – telah dibangun. Contoh ini memberikan beberapa perspektif bagi provinsi saya. Di Papua hutan merupakan milik berbagai kelompok tradisional yang seringkali memiliki perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana hutan harus dikelola. Menggabungkan mereka bersama dalam suatu koperasi pengelolaan hutan dapat mengharmonisasikan berbagai macam keinginan dan kebutuhan kelompok dan dengan demikian memungkinkan suatu sistem pengelolaan yang berarti dapat dibangun.

GTZ: A pakah kelompok-kelompok ini benar-benar tertarik dengan pemanfaatan hutan yang berkesinambungan?

Kayoi: Tentu saja! Kelompok-kelompok ini sudah memperlakukan hutan dengan cara-cara yang berkelanjutan. Namun, waktu dan tentunya telah terjadi intervensi dari luar. Di masa lalu, pemerintah pusat memberikan ijin tebang habis bagi pengusaha hutan tanpa mendiskusikannya dengan kantor kehutanan lokal. Bersyukur hal tersebut sudah berubah sekarang. Pembentukan perusahaan kehutanan di provinsi dan kabupaten saat ini telah disetujui. Kami akan memulai dengan satu model percontohan di tiap daerah. Untuk melaksanakan gagasan ini, diperlukan persetujuan dari tiga menteri, yang masing-masing mengirimmkan perwakilannya dalam kunjungan ini. Mereka semua terkesan dan setuju bahwa pemikiran tentang perusahaan hutan perlu diterapkan di Indonesia.



>> Pusat Kerjasama Luar Negeri



Laksmi Banowati, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan Indonesia.

GTZ: Apakah peran Pusat Kerjasama Luar Negeri, dan bagaimana Anda menilai kerja sama dengan Jerman dibidang kehutanan?

Banowati: Saya bekerja langsung dengan berbagai organisasi pelaksana dari donor internasional. Salah satu dari peran utama saya adalah mengkoordinasikan berbagai program dan proyek yang didukung oleh donor internasional. Saat ini kami memiliki 31 proyek yang sedang berjalan. Pusat KLN memastikan bahwa proyek-proyek yang ada ini mendukung sasaran kebijakan pemerintah Indonesia dibidang kehutanan. Dalam konteks ini, Jerman telah lama menjadi partner yang berharga dan dapat diandalkan. Kami sangat senang bahwa kita bisa melanjutkan kerja sama yang telah berhasil dilaksanakan dengan Jerman dibidang kehutanan dan juga perubahan iklim di tahun-tahun mendatang. Kunjungan studi ini telah membantu kami untuk mencapai sasaran politis, terutama terkait dengan reformasi administrasi kehutanan. Kami

berharap untuk dapat melanjutkan dan mengintensifkan dialog saat ini antar ahli kehutanan Jerman dan Indonesia.

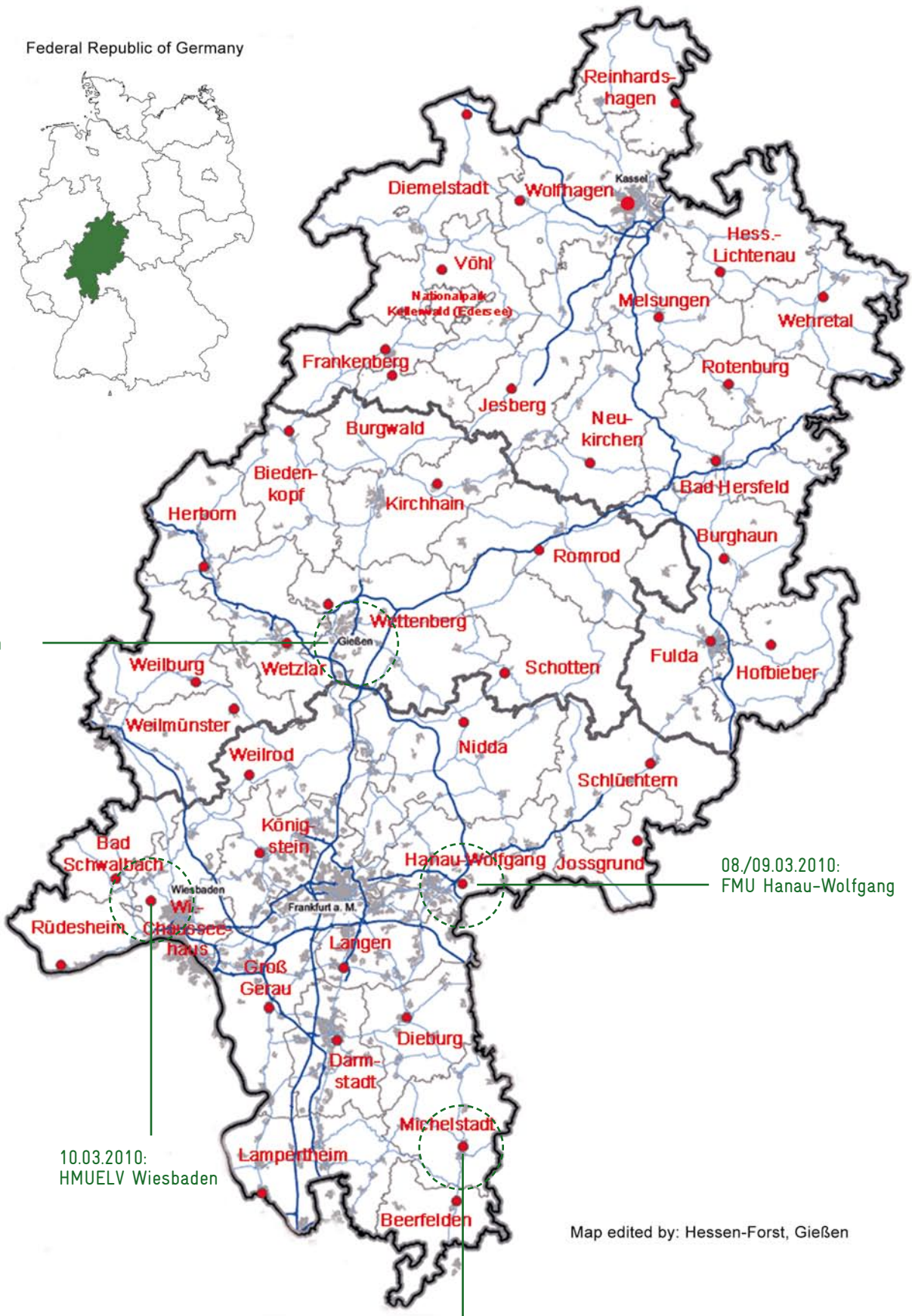


Kesan kesan dari perjalanan



Rencana Perjalanan

Federal Republic of Germany



11.03.2010:
FENA, Gießen

08./09.03.2010:
FMU Hanau-Wolfgang

10.03.2010:
HMUELV Wiesbaden

12.03.2010:
FMU Michelstadt

Map edited by: Hessen-Forst, Gießen

» Sistem kesatuan pemangkuan hutan dalam kerangka kerja pengelolaan hutan negara – kerangka kerja hukum, organisasi, tanggung jawab, pengawasan dan pengendalian

- 08.03.2010 KPH Hanau-Wolfgang (termasuk kunjungan lapangan)
- 08.03.2010 Organisasi pengelolaan hutan dan administrasi kehutanan di Jerman dan Negara bagian Hesse
- 10.03.2010 Kementerian kehutanan, energi, pertanian dan perlindungan konsumen - Hessian Ministry for the Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection (HMUELV)
- 11.03.2010 Inventarisasi Hutan, Perencanaan dan Layanan Data dari Hessen-Forst (FENA), ... (termasuk kunjungan lapangan)
- 12.03.2010 KPH Michelstadt (termasuk kunjungan lapangan)





FORCLIME Forests and Climate Change Programme (TC Module)
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
Web: www.forclime.org

Imprint:
Responsible: Rolf Krezdorn
Author: Gabriele Rzepka
Photos: Klaus Görden
Design: Alexandra Müller
Eschborn 2010
Printed by:
sunsetmedia creativestudio
Jakarta12740, Indonesia